

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Terkait Pembatasan Periode Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Ini ditulis oleh Arin Retno Pembayun, Nim 126103201073, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H.,M.Hum.

**Kata Kunci :** Ketua Umum Partai Politik, Pembatasan Periode Jabatan, Undang-undang Partai Politik

Penelitian ini didorong oleh adanya masalah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang tidak menetapkan batasan mengenai periode masa jabatan ketua umum partai politik. Akibatnya, hal ini menimbulkan ketidakadilan dan merugikan hak-hak konstitusional anggota partai dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana pengaturan periode masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana analisis peraturan terkait perodesasi masa jabatan ketua umum partai politik terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik? 2). Bagaimana rekonstruksi ideal terhadap penetapan peraturan terkait pembatasan perodesasi masa jabatan ketua umum partai politik terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama. Data dikumpulkan melalui kajian arsip atau studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, analitis, serta teknik interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pengaturan terkait periode masa jabatan ketua umum partai politik dari segi subsansi hukum, belum ada peraturan yang cukup signifikan mengenai batasan periode masa jabatan ketua umum, yang berdampak pada tercederainya hak konstitusional anggota partai. Dalam hal struktur hukum, pemerintah saat ini belum mendorong dan memncermati pada pentingnya pembatasan periode masa jabatan ketua umum. Selain itu, dari perspektif budaya hukum, banyak partai politik yang mengabaikan peraturan yang ada dan tidak secara serius mengatur proses pembentukan kepengurusan serta pembatasan kekuasaan pimpinan partai secara demokratis dalam AD/ART-nya. 2). Pembatasan periode jabatan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan

partai politik di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada revisi dalam Undang-Undang Partai Politik terkait hal ini dengan mempertimbangkan konsep pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik Negara Chili dan Ekuador yang memberikan kelonggaran menggunakan konsep "No Immediate Re-election". Konsep ini memungkinkan seseorang untuk mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum setelah penggantinya menjabat setidaknya satu periode. Dengan cara ini, anggota partai tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan problematika yang ada dapat diatasi dengan lebih baik.

## ABSTRACT

Thesis with the title “Juridical Analysis of the Stipulation of Regulations Related to the Periodic Limitation of the Term of Office of the General Chairperson of Political Parties Against Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties”. This is written by Arin Retno Pembayun, Nim 126103201073, Constitutional Law Study Program (HTN), Faculty of Sharia and Legal Sciences, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum.

**Keywords:** Chairman of Political Party, Term Limitation, Political Party Law

This research is motivated by the problems in Law Number 2/2011 on Political Parties which does not regulate the term limits of political party chairpersons. As a result, this creates injustice and harms the constitutional rights of party members in its implementation. Therefore, researchers are interested in studying and analyzing how the regulation of the term of office of the general chairman of a political party in Law Number 2 of 2011.

The problem formulations in this study are: 1). How is the analysis of arrangements related to the term of office of the general chairman of a political party against Law Number 2/2011 on Political Parties? 2). How is the ideal reconstruction of the establishment of regulations related to the limitation of the term of office of the general chairman of a political party against Law Number 2/2011 on Political Parties?

The method used in this research is normative legal research, which utilizes legislation as the main data source. Data is collected through archival studies or literature studies, while data analysis is carried out using descriptive, analytical methods, as well as interpretation and conclusion techniques.

The results of this study show that: 1). Regulations related to the period of office of the general chairman of a political party in terms of legal substance, there are no significant regulations regarding the limitation of the period of office of the general chairman, which has an impact on the constitutional rights of party members. In terms of legal structure, the current government has not encouraged and scrutinized the importance of limiting the term of office of the general chairman. In addition, from the perspective of legal culture, many political parties ignore existing regulations and do not seriously regulate the process of forming management and limiting the power of party leaders democratically in their bylaws. 2). Limiting the term of office can have a positive impact on the life of political parties in Indonesia. Therefore, there needs to be a revision in the Law on Political Parties related to this matter by considering the concept of limiting the term of office of the chairman of a political party in Chile and Ecuador, which provides flexibility

using the concept of “No Immediate Re-election”. This concept allows a person to run for re-election as chairperson after their successor has served at least one term. In this way, party members still have the opportunity to participate and existing problems can be better addressed.



يوفر مرونة باستخدام مفهوم "عدم إعادة الانتخاب الفوري". ويسمح هذا المفهوم للشخص بالترشح لإعادة انتخابه كرئيس بعد أن يكون خلفه قد قضى فترة واحدة على الأقل. وبهذه الطريقة، تظل الفرصة متاحة للأعضاء الحزب للمشاركة ويمكن معالجة المشاكل القائمة بشكل أفضل.